

## Table of Contents

1. RPKAD .....	2
2. BATAN .....	6
<b>3. Staatspartij .....</b>	<b>10</b>
4. Negara Federal.....	12
<b>5. Menuju Indonesia Baru.....</b>	<b>16</b>
6. Pembangunan Delapan Tahun .....	17
7. Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (PERTI).....	21
8. Oetoesan Hindia .....	26
9. Oetoesan Ra'jat .....	31
10. Oetoesan Melajoe .....	31
11. Soenting Melajoe.....	35
12. Pemandangan .....	44

## 1. RPKAD

RPKAD ialah singkatan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat. Resimen ini bermula ketika dua perwira Indonesia, Alex Kawilarang dan Slamet Riyadi, memimpin penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950. Yang pertama berperan sebagai Pemimpin Umum Operasi Penumpasan, sedang yang kedua berperan sebagai Panglima Operasi, dengan tugas yang jelas: "Pemberontakan harus ditindas sampai kepada akar-akarnya," demikian kata sebuah pemberitaan milik angkatan bersenjata (Soetrisno, 1962).

Di medan tempur di Timur Indonesia itu, alih-alih memukul mundur kaum pemberontak dengan mudah, Slamet Riyadi justru menyaksikan kehebatan tempur pasukan RMS. Tentara nasional yang dikirim ke sana merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. Dalam beberapa pertempuran, RMS dengan jumlah pasukan yang kecil mampu menggagalkan berbagai serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar, "sehingga menimbulkan korban jang tidak sedikit pula," sebut majalah yang sama (Soetrisno, 1962; Galih, 2009, 78).

Ketika kemudian Slamet Riyadi mengevaluasi operasi, dia mendapati kenyataan kalau RMS punya pasukan komando dengan taktik dan pengalaman tempur yang cukup baik. Mereka juga didukung kemampuan tembak tepat sasaran dan gerakan perorangan yang baik. Sejak saat itulah, kata laporan yang sama, "Panglima Operasi menaruh perhatian akan betapa pentingnja Pasukan Para Komando didalam Angkatan Perang kita" (Soetrisno, 1962; Galih, 2009, 78).

Slamet Riyadi kemudian berencana membuat sebuah resimen pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat, dengan kemampuan perorangan yang mumpuni. Setelah operasi di Maluku selesai, dia lalu berniat akan memelopori pembentukan Pasukan Para Komando di dalam tubuh TNI yang ketika itu masih bernama Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Namun, pada 4 hari setelah kota Ambon diduduki APRI, Slamet Riyadi justru gugur sebelum cita-citanya tercapai. Namun, niatnya untuk membentuk pasukan komando tidak berhenti dengan kematiannya. Kawilarang, rekannya di ketentaraan, kemudian mewujudkan cita-cita itu. Setelah operasi di Maluku selesai, Kawilarang memulai pembentukan pasukan komando dengan pendidikan pendahuluan, mula-mula di Makassar, kemudian diteruskan di Bogor. Untuk

membentuk unit komando itu, Kawilarang merekrut seorang mantan prajurit komando pasukan Inggris, yang kemudian bergabung ke dalam pasukan KNIL Belanda kelahiran Kanada. Ia memiliki nama asli Rokus Bernardus Visser, namun setelah menjadi WNI berganti nama menjadi Mohammad Idjon Djambi.

Bersebab beberapa alasan teknis, usaha-usaha untuk membentuk pasukan komando "tidak dapat berkembang dengan lantjar" (Soetrisno, 1962). Barulah saat Kawilarang menjadi Panglima Teritorium III Siliwangi pada 1952, dia dapat mewujudkan membentuk Kesatuan Komando Teritorium III, yang berkekuatan satu kompi. Komandan pertamanya langsung dijabat Mohammad Idjon Djambi. Markas pasukan komando ini terletak di Batujajar, Bandung.

Tidak berselang setahun dibentuk, Pasukan Komando Siliwangi di bawah Mayor Idjon ini langsung diturunkan ke medan tempur melumpuhkan gerakan DI/TII di pedalaman Jawa Barat, dan untungnya berhasil dengan baik dalam berbagai operasi. Keberhasilan mereka menarik perhatian Markas Besar TNI Angkatan Darat yang kemudian mengembangkannya menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD) pada 9 Februari 1953. Pada tanggal tersebut Kesatuan Komando Teritorium III dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Setelah jumlah anggota berkembang, KKAD ditingkatkan (*diupgrading*) menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang tetap dipimpin oleh Mochamad Idjon Djanbi. Tepatnya, pada 25 Juli 1955, di Batu Jajar, Wakil Presiden Mohammad Hatta memimpin upacara resmi peningkatan KKAD menjadi RPKAD (Conboy, 2003). Untuk menandai perubahan itu, para tentara merendam tutup kepala mereka yang berwarna lumpur dengan pewarna merah. Lebih sesuai dengan warna yang secara tradisional disukai oleh pasukan udara di Eropa, RPKAD sejak saat itu distandarisasi menjadi baret merah.

RPKAD di masa ini hanya terdiri dari satu kompi. Lalu karena satu kompi tempur saja dianggap terlalu kecil untuk sebuah resimen, maka RPKAD pada minggu-minggu berikutnya mulai merekrut calon anggotanya untuk mengikuti siklus pelatihan baru. Dari 332 calon yang menjawab panggilan tersebut, sekitar setengahnya berasal dari Jawa Barat dan setengahnya lagi dari Jawa Tengah (Conboy, 2003). Tahun 1959 unsur-unsur tempurnya juga dipindahkan ke

Cijantung, di timur Jakarta. Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharuddin Nasution. Pada tahap awal pasukan ini memiliki tiga kompi, masing-masing berkekuatan sekitar 300 anggota dan dari setiap kompi dibagi atas tiga peleton.

Pada masa RPKAD ini pasukan baret merah kian mencuat dengan keberhasilannya di medan tempur melawan PRRI Permesta di Sulawesi dan Sumatra. "Orang2 jang bila mengawal sebuah konvooi dapat melegakan hati penumpang iringan mobil, itulah manusia2 RPKAD jang telah banjak tjatatan2 kepahlawanan dimedan operasi di Sumatera dan Sulawesi Utara," demikian ditulis dalam majalah tentara.

Mereka juga dikenal tangguh dalam pertempuran saat konfrontasi dengan Malaysia. Pada kurun ini setengah pasukannya dikirim ke Borneo. Nama pasukan komando ini semakin menjadi buah bibir ketika pada 1965, di bawah Sarwo Edhi Wibowo, RPKAD berperan besar menumpas G30S/PKI. "The PKI really began to be destroyed when hit by the RPKAD. The number of PKI people killed was far more than the number of RPKAD troops," tulis John Roosa (2020). Pada tahun 1965 ini, RPKAD memang hanya unit kecil saja di Angkatan Darat, tetapi posisi dan perannya penting. Resimen ini terlatih secara militer sekalipun belum punya banyak pengalaman dalam politik. Meski sejumlah pasukan RPKAD di Jawa hanya tinggal separuh karena dikirim ke perbatasan Malaysia dalam rangka konfrontasi Dwikora, resimen ini tidak sulit menggulung gerakan 30 September yang dipimpin Untung. Di samping perlawanan yang tidak giat, RPKAD dimudahkan dengan dukungan masa penentang PKI terhadapnya (Matanasi, 2011; Gunawan, 2012).

Dalam perjalanan berikutnya, pada 12 Desember 1966 nama RPKAD diganti menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat (Puspasus AD). Kemudian, pada 17 Februari 1971 Puspasus AD berubah nama lagi menjadi Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassanda). Nama Kopassanda berubah menjadi Kopassus pada 26 Desember 1986 dan nama itu masih dipakai hingga sekarang.





**Pemeriksaan barisan Kompie RPKAD oleh KSAU dan KSAD.**

Sumber: Kapten Soetrisno, "Sedjarah Singkat Corps Para Komando Angkatan Darat", *Madjalah Sedjarah Militer Angkatan Darat*, No. SA - 10 - Tahun 1962 Diterbitkan Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat (h. 48-52).

**Referensi:**

- Petrik Matanasi, *Untung, Cakrabirawa, dan G 30 S*, Jakarta: Trompet Book, 2011
- Restu Gunawan, Sukri Abdurrachman, Taufik Abdullah, *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II Konflik Lokal Volume 2*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2012.
- John Roosa, *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia*, University of Wisconsin Press: 2020.
- Kenneth J. Conboy, *Kopassus Di dalam Pasukan Khusus Indonesia*, Pub Ekuinoks: 2003.
- Kapten Soetrisno, "Sedjarah Singkat Corps Para Komando Angkatan Darat", *Madjalah Sedjarah Militer Angkatan Darat*, No. SA - 10 - Tahun 1962 Diterbitkan Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat (h. 48-52).
- Galih, "Komando Pasukan Khusus (Kopassus)", Beni Sukadis (ed.), *Almanak Rformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Lesperssi & DCAF, 2009 (h. 76-90).

## **2. BATAN**

Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ialah lembaga negara yang mengurus bidang riset tenaga nuklir di Indonesia saat ini. Cikal-bakalnya bernama Lembaga Tenaga Atom (LTA) yang didirikan Soekarno pada tahun 1959.

Proses pendiriannya bermula ketika Presiden pertama Indonesia itu mendirikan sebuah komisi untuk riset radioaktif pada 1954. Komisi ini, atau Panitia Negara ini, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penyebaran radioaktif akibat uji coba senjata bom atom di Lautan Pasifik. Komisi ini sekaligus juga memperhatikan perkembangan pemanfaatan dan penggunaan energi nuklir bagi kemaslahatan masyarakat. Komisi itu kemudian diinstruksikan untuk agenda nuklir lebih lanjut sehingga terbentuklah Dewan Tenaga Atom atau Lembaga Tenaga Atom (LTA) pada tanggal 5 Desember 1958 melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958 (Corneo, 2000: 34).

Lembaga ini dipimpin oleh Dr. G.A. Siwabessy, seorang doktor radiologi yang dipunyai Indonesia. Di bawah Siwabessy, LTA berulang kali mengadakan pelatihan nuklir baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Corneo, 2000: 34-4).

Dengan meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, Soekarno mengalihkan tujuan program nuklir ke tujuan militer dengan mengumumkan rencana mengejutkan untuk membangun bom atom pertama di Indonesia. Atmosfir Perang Dingin, di mana Soekarno memiliki hubungan dekat dengan negara-negara sosialis, telah mendorong Indonesia bergerak ke arah pengembangan nuklir. Tujuan awalnya terutama untuk tujuan persenjataan bagi kepentingan militer. Kegetolan Soekarno akan senjata nuklir karena beberapa sebab, terutama untuk melindungi Indonesia dari rongrongan Barat, dalam kasus Inggris di Malaysia dan gerakan Amerika di Vietnam sebagai bentuk penjajahan baru yang bukan tidak mungkin juga berhasrat kepada Indonesia (Corneo, 2000: 40), di samping juga untuk memberikan situasi yang aman bagi kondisi dalam negeri yang sedang dilanda turbulensi politik.

Dalam usaha peningkatan penguasaan dalam bidang teknologi nuklir, pada tanggal 20 Februari tahun 1965, Soekarno meresmikan reaktor nuklir pertama

yang dimiliki Indonesia. Reaktor ini hadir untuk mendukung perkembangan riset atom dan energi nuklir. Berlokasi di Bandung, reaktor ini diberi nama *Triga Mark II*. Reaktor yang dikelola ITB ini mulai bekerja dalam taraf percobaan sejak bulan Oktober tahun 1964. Instalasi ini dipergunakan untuk penelitian dan latihan fisik reaktor dan fisika inti serta memproduksi isotop-isotop radioaktif. Pembangunan reaktor ini merupakan tahap penting dalam rangkaian kegiatan pengembangan proyek-proyek penelitian atom di Indonesia di bawah LTA. Indonesia masa itu sesungguhnya juga telah memiliki proyek penelitian atom di Universitas Gadjah Mada yang diresmikan penggunaannya sejak bulan Oktober 1962. Sebuah laboratorium isotop untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan mengenai pemanfaatan isotop radio aktif juga telah didirikan di Pasar Jumat, Jakarta. Sementara di Serpong, Tangerang, mulai dibangun juga suatu pusat penelitian nuklir dengan menggunakan reaktor IRI-2000 dari Rusia, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Soekarno pada tanggal 16 Januari 1965 (Sekretariat Negara, 1977: 506).

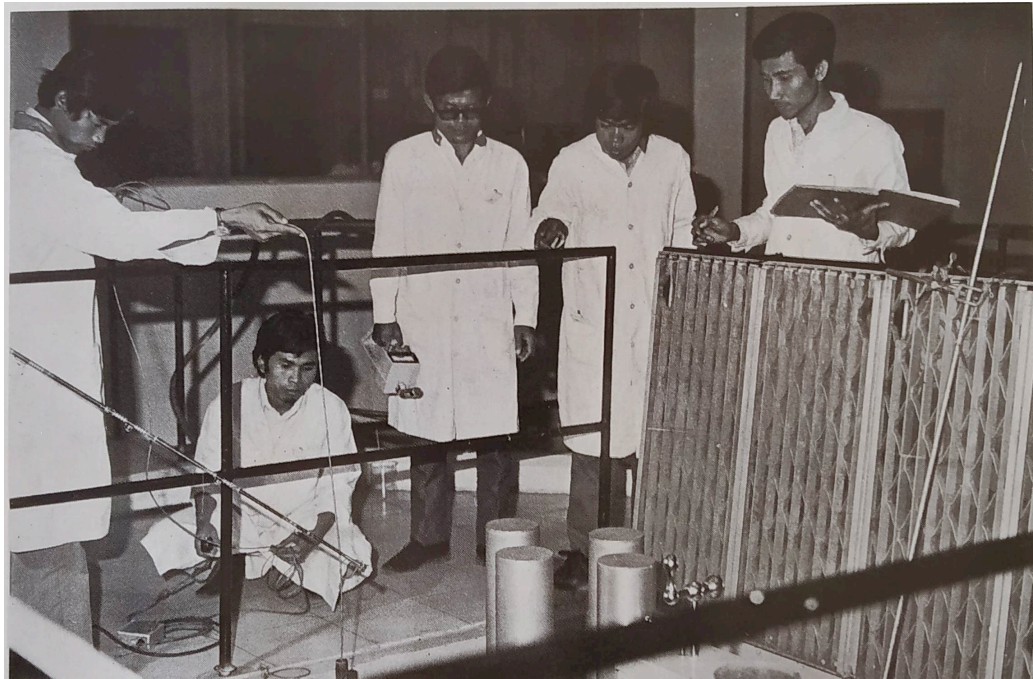
Pada Maret 1965, Soekarno tampaknya menginginkan progress yang lebih cepat lagi, lalu memutuskan mereorganisasi dan mengubah LTA menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Dr. G. A. Siwabessy, mantan direktur LTA, diangkatnya menjadi direktur BATAN yang pertama (Corneo, 2000: 35). Pada Juli 1965, dengan bangga dan percaya diri Soekarno mengumumkan kalau Indonesia sudah siap menjadi negara nuklir masa depan, di mana BATAN menjadi tulang punggung untuk mencapai impian itu. Namun, Soekarno jatuh dari kekuasaan tidak lama setelah itu, dan berakhirnya kekuasaan Soekarno juga mengubah arah BATAN. Proyek pembangunan fasilitas nuklir di Serpong, Tangerang, misalnya tidak lagi dilanjutkan (Sekretariat Negara, 1977: 506).

Sejak awal era Soeharto, rencana pengembanan energi nuklir (apalagi untuk kepentingan militer) tidak pernah lagi didengungkan. Soeharto hanya mengejar agenda nuklir untuk tujuan damai. Oleh sebab itu, riset dan pengembangan nuklir yang dilakukan di BATAN juga diarahkan untuk tujuan yang sama. Secara berturut, dibangun beberapa fasilitas untuk keperluan penelitian: Pusat Penelitian Tenaga Atom yang berlokasi di Pasar Jumat Jakarta Selatan pada 1966 dan pembangunan Pusat Penelitian Tenaga Atom di Yogyakarta pada 1967. Sejak itu,

BATAN memanfaatkan energi nuklir hanya untuk tujuan medis dan pertanian. Meskipun gagasan untuk menggunakan energi nuklir sebagai sumber energi telah muncul sejak tahun 1968, rencana tersebut tidak pernah terwujud. Setidaknya ada dua rencana untuk mengembangkan PLTN selama tahun 1980-an, tetapi Soeharto tidak pernah menyetujui rencana tersebut (Suleiman, 2014: 383).

Kedekatan Orde Baru dengan negara-negara Barat membatasi program nuklir Indonesia hanya untuk tujuan damai. Soeharto sejak awal menyadari pentingnya menjaga program nuklir untuk kepentingannya sendiri. Hal ini terlihat jelas dari besarnya dana yang diberikan pemerintahnya kepada BATAN untuk keperluan pembangunan dua reaktor riset tambahan. Dari dana tersebut, BATAN membangun reaktor riset 100 kW di Yogyakarta pada akhir 1970-an, disusul reaktor 30 MW di Serpong beberapa tahun kemudian (Amir, 2019: 347; Amir, 2010: 101).

Upaya nuklirisasi tampak lebih serius ketika pada tahun 1972 Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) membantu BATAN untuk mempelajari kelayakan tenaga nuklir di Indonesia. Namun, realisasinya tidak berjalan mulus. Pengejaran Indonesia untuk nuklir berbenturan dengan politik energi yang sebagian besar didorong oleh minyak yang menggerakkan sebagian besar ekonomi-politik Orde Baru. Akibatnya, proposal produksi tenaga nuklir yang digagas BATAN tertunda selama bertahun-tahun, dan hingga kejatuhan Soeharto dari kursi kekuasaan pada tahun 1998, program nuklir yang layak di Indonesia tidak pernah menjadi kenyataan.



Gambar: Tenaga Ahli Nuklir Indonesia sedang bekerja di BATAN. Sumber: Sekretariat Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1977.

**Referensi:**

- M. Ajisatria Suleiman, "Law and politics of nuclear power plant development in Indonesia: technocracy, democracy, and internationalization of decision-making", Michael Faure & Andri Wibisana (editor), *Regulating Disasters, Climate Change and Environmental Harm: Lesson from the Indonesian Experience*, USA: Edward Elgar, 2013.
- Robert. M. Cornejo, "When Sukarno sought the bomb: Indonesian nuclear aspirations in the Mid 1960s", *The Nonproliferation Review*, 7 (2000), 31–43.
- Sekretariat Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1977.
- Sulfikar Amir, "Challenging Nuclear: Antinuclear Movements in Postauthoritarian Indonesia", *East Asian Science, Technology and Society: an International Journal*, 3 (2019), 343-66.
- Sulfikar Amir, "The state and the reactor: nuclear politics in post-Suharto Indonesia", *Indonesia*, 89 (2010), 101-47.

### 3. Staatspartij

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia disibukkan mencari formulasi kepartain yang cocok bagi kepribadian bangsa. Sekalipun perdebatan tentang itu telah juga dirintis sejak era pergerakan, namun era kemerdekaan menjadi era di mana suatu gagasan akan sistem kepartaian harus diwujudkan dalam tataran praktik. Sebagian elite bangsa menginginkan sistem multipartai untuk menampung aspirasi berbagai kalangan masyarakat yang memang beragam. Namun ada alternatif lain dari itu yang pernah ditawarkan, sebuah sistem satu partai atau yang dikenal juga dengan istilah partai negara (*staatspartij*).

Pada 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, Soekarno melemparkan gagasan tentang persatuan yang akan diusahakan dalam bentuk partai negara (*staatspartij*) yang kemudian dikenal dengan PNI-Staatspartij. Pada tanggal 23 Agustus 1945 Soekarno menyampaikan gagasannya tentang PNI-Staatspartij itu melalui radio. Pembentukan partai negara yang diprakarsia oleh Soekarno dimaksudkan untuk suatu wadah persatuan (Humairoh, 2020: 167).

Maka sistem kepartaian pada permulaan revolusi, "tepatnja pada tanggal 22 Agustus 1945 dimulai ditjoba untuk membentuk satu partai sadja, satu „staatpartij”, dengan nama Partai Nasional Indonesia" (S.U. Bajasut, 1972: 234)

Keberadaan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai resmi negara yang kemudian dikenal dengan PNI staatpartij kurang berkenaan di hati Syahrir. Ia melihat PNI dikuasai oleh pemimpin-pemimpin politik yang telah menikmati kedudukan tinggi dan kehidupan yang menyenangkan di tengah-tengah penderitaan dan kemelaratan rakyat selama zaman Jepang (Ibrahim, 2018: 4).

Sebelumnya, pada zaman pergerakan Soekarno pernah juga menulis tentang partai pelopor, di mana ia mempunyai pandangan bahwa untuk mewujudkan persatuan harus ada sebuah wadah yang menjadi syarat tercapainya persatuan. Menurut Soekarno, wadah yang paling ideal adalah partai pelopor. Melalui partai pelopor masyarakat akan disadarkan dan digerakkan (Julianto Ibrahim: 2018).

***Referensi:***

Iftitah Dian Humairoh, dkk., "Soekarno's Consideration About The Unity Of Indonesia With Composing PNI as Staatspartij Years 1945", *Jurnal Historica*, Volume 4, Issue 2 Oktober 2020, p. 157-171.

Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.

S. U. Bajasut, *Alam Fikiran dan Djedjak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito*, Surabaya: Kompas Media Nusantara, 1972.

#### 4. Negara Federal

Saeroen mengasuh rubrik pojok di koran *Pemandangan* dengan nama pena Kampret. Pada suatu edisi di tahun 1933, Kampret menulis mengenai impiannya akan Hindia Belanda masa depan, yang akan berbentuk federal, bernama Republik Indonesia Serikat. Perdana Menteriya ialah M.H. Thamrin, Menteri Pekerjaan Umum dijabat Abikusno Tjokrosuyoso, Menteri Pengajaran diampu Ki Hajar Dewantara, dan Menteri Penerangan jadi tanggung jawab Parada Harapap. Impian Kampret di pojok koran itu ditanggapi serius oleh pemerintah kolonial Belanda. *Pemandangan* kena *persbreidel ordonantie*, dilarang terbit untuk jangka waktu satu minggu. Sejarah mencatat, kalau inilah kalipertama, "... impian di koran terkena ranjau pers" (Rahzen, 2007: 142).

Gagasan negara federal ala Kampret atau Saeroen itu bukanlah yang pertama dan terakhir muncul di Indonesia. Pada 14 Desember 1928, Frederik Willem Tobias Hunger Jr. menulis disertai berjudul *Federatieve Staatsbouw, Een Vraagstuk voor Nederlandsch-Indie* [Bentuk Negara Federal, Suatu Persoalan untuk Hindia Belanda], yang dipertahankannya di Universitas Leiden dan, dan diterbitkan sebagai buku pada tahun yang sama oleh H.J. Paris, Amsterdam. Melalui karya ini, Hunger Jr. memperkenalkan pilihan negara federal sebagai bentuk sistem negara cocok untuk Indonesia di masa mendatang, di mana keberagaman yang menjadi ciri dasar Hindia Belanda akan dapat diakui sepenuhnya dan mendapat tempat yang sewajarnya (Swantoro, 2016: 298).

Ketika Perhimpunan Indonesia mengadakan kongres pada tanggal 7 dan 28 Maret 1926 di Belanda, Sunarjo telah memunculkan persoalan mengenai bentuk negara Indonesia merdeka. Hatta dan mayoritas mahasiswa di Amsterdam lebih memilih sistem negara federal dengan alasan karena adanya keragaman latar budaya di Hindia (Latif, 2012: 379). Setahun sebelumnya itu, pada tahun 1925 Gubernur Jenderal van Limburg Stirum sudah juga mengemukakan gagasan yang kurang-lebih sama: betapa perlunya dibuka kemungkinan berlakunya bentuk negara federal di Hindia-Belanda. Sekalipun van Limburg Stirum tetap mengatakan kalau kemungkinan itu tidak boleh melupakan kekuatan pemerintahan di Hindia-Belanda yang bertitik-pangkal pada bentuk kesatuan (Swantoro, 2016: 298).



Namun, sesungguhnya, gagasan negara federal bagi Indonesia justru mula-mula berasal dari seorang insinyur kehutanan bernama Ritsema van Eyck. Pada tahun 1916, van Eyck menjabat Kepala Dinas Kehutanan di Cepu, Dari pengalaman-pengalaman lapangannya sebagai pegawai kehutanan, dia kemudian berpendapat kalau manajemen pemerintahan Hindia-Belanda tidak mungkin secara uniform dari daerah satu ke daerah lain. Dia mengakui keragaman lokal dalam legislasi dan pelayanan pemerintahan akan lebih efektif berjalan jika dalam format negara federal (Mboi, 2011: 467).

Dalam praktiknya, realisasi atas negara federal dilakukan van Mook pada kurun yang jauh lebih belakangan, ketika pada tahun 1940 dia mengeluarkan idenya dengan hadir sebagai eksponen pendirian yang menghendaki Hindia-Belanda lepas dari Nederland. Maksudnya, Hindia-Belanda tidak lagi diperintah dari Den Haag, tetapi dari Batavia. Tidak hanya itu, van Mook juga menginginkan posisi yang kuat bagi seorang Gubernur Jenderal dengan menyisihkan *Volksraad* maupun *Raad van Indie* sebagai Dewan Penasehat Gubernur Jenderal (Swantoro, 2016: 297).

Hubertus van Mook, demikian nama lengkapnya, disebut-sebut sebagai "Arsitek Negara Federal" yang mempersiapkan Indonesia menjadi negara federal. Van Mook menyampaikan lagi ide tentang Indonesia sebagai negara federal pada tanggal 21 Desember 1945 pada rapat Dewan Menteri Kerajaan Belanda. Prinsip dasar dari gagasan van Mook ini diambil dari kebijakan Ratu Belanda yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 7 Desember 1942. Isinya antara lain Indonesia akan dijadikan negara *commonwealth* (persemakmuran) berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

Namun, sekalipun mulai bertiup kencang baru pada akhir kekuasaan kolonial dan mendapat momentum untuk tumbuh lebih nyata pada awal aneksasi kembali selama masa revolusi, gagasan van Mook mengenai bentuk pemerintah federal itu sebenarnya sudah berada dalam bentuk janin ketika van Mook baru berusia 23 tahun. Ketika dia, sebagai mahasiswa Belanda, hadir dalam acara makan bersama bersama berbagai delegasi yang ditaja *Indische Vereniging* di Den

Haag, pada 14 April 1917. Dia menekankan perlunya pembinaan kerja sama antara berbagai kelompok penduduk di Hindia-Belanda (Akira, 1986: 153-4). Di kemudian hari dia diangkat menjadi anggota *Volksraad* dan merupakan salah seorang ahli masalah penjajahan selama dan setelah Perang Dunia II yang memegang jabatan sebagai Menteri Jajahan dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang memungkinkannya mengadakan suatu sistem negara federal untuk Indonesia (Akira, 1986: 154).

Setelah melalui beberapa konferensi di Denpasar dan Malino-Makassar, van Mook berhasil merealisasikan idenya untuk membentuk sistem pemerintahan federal dengan mula-mula membentuk Negara Indonesia Timur pada tanggal 18 Desember 1946. Beberapa negara federal lain kemudian berhasil dibentuk van Mook, di antaranya ialah Negara Pasundan, Daerah Istimewa Borneo, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Jawa Timur. Upaya ini, kata Smit, merupakan suatu taktik Belanda mengadu-domba suatu daerah dengan daerah yang lain dalam wilayah Indonesia, "dengan kata lain suatu politik 'pecah-belah dan kuasai', ungkapa dari nafsu bertahan Belanda," demikian Smit, (1986: 15). Anak Agung pun berpendapat sama, kalau upaya van Mook melancarkan kampanye negara federal hanya sebagai senjata politik untuk mengisolasi Republik Indonesia yang ketika itu berpusat di Yogyakarta. Selain itu, van Mook juga menggunakan negara federal untuk menggunakannya sebagai jembatan dalam mewujudkan cita-citanya mendirikan sebuah negara yang tidak diperintah dari Den Haag. Negara yang dimaksud ini bakal dikendalikan dari Batavia secara otoriter dan akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan van Mook sendiri (Swantoro, 2016: 301).

Negara federal yang 'diciptakan' van Mook tidak bertahan lama di Indonesia. Negara federal yang bertentangan dengan kemauan kebanyakan orang Indonesia yang menginginkan suatu negara republik kesatuan (Akira, 1986: 154). Negara federal terbukti tidak populer (Mutawally, 2021: 13) dan kebanyakan rakyat meminta untuk mengintegrasikan kembali negara-negara bagian yang sudah ada terbentuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar: Konferensi Malino di Makassar tahun 1946 dalam upaya van Mook menggodok pembentukan negara federal. Sumber: KITLV No. 157702.

**Refesensi:**

- Anwar F Mutawally, "State of East Indonesia (1946-1950) from Netherlands Puppet State and Return to Indonesia." *SocArXiv*. 26 November 2021, doi:10.31235/osf.io/ag9e2.
- P. Swantoro, *Dari Buku ke Buku*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Taufik Rahzen (editor), *1907-2007 Seabad Pers Kebangsaan*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.
- Ben Mboi, *Ben Mboi: memoar seorang dokter, prajurit, pamong praja*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- C. Smit, *Dekolonisasi Indonesia fakta dan ulasan*, Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Akira Nagazumi, "Masa Awal Pembentukan 'Perhimpunan Indonesia', Kegiatan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, 1916-1917", dalam Akira Nagazumi (penyunting), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang: Perubahan Sosial-ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Jakarta: Democracy Project, 2012.

## **5. Menuju Indonesia Baru**

## **6. Pembangunan Delapan Tahun**

Pembangunan Delapan Tahun ialah nama untuk suatu naskah rancangan ekonomi pemerintah masa Demokrasi Terpimpin di era Presiden Soekarno. Rancangan ini disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas sendiri dibentuk Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959 dengan tugas utama "mempersiapkan rancangan undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana" (Marwati, 1984: 322). Depernas dipimpin Mr. Muhammad Yamin, yang ketika itu juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertama. Anggotanya terdiri dari 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah. Dalam waktu kurang-lebih satu tahun, dewan itu berhasil merampungkan tugasnya, ketika pada bulan Agustus 1960, Presiden Soekarno melalui Dewan Perancang Nasional (Depernas) mengumumkan "Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional tahapan tahun 1961-1969". MPRS menyetujui rancangan tersebut dengan TAP No. 2/MPRS/1960 (Marwati, 1984: 322).

Dengan disetujuinya rancangan itu, maka pada 1 Januari 1961, Presiden Soekarno meresmikan dimulainya Pembangunan Nasional Semester Berencana dalam suatu upacara pencangkulan tanah (petakan batu pertama) pembangunan Gedung Pameran Pola Pembangunan Nasional Semesta (Gedung Pola) di Jakarta. Ini menandai dimulainya perencanaan dan pembangunan berbagai proyek lain yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama di bidang industri dan prasarana. Di bidang industri, misalnya, titik berat pembangunan diletakkan kepada pembangunan industri berat dan industri kimia dasar, antara lain mulai dengan membangun pabrik superfosfat di Cilacap (Jawa Tengah), pabrik peleburan baja di Cilegon (Jawa Barat), serta pabrik semen, pabrik gula, dan pabrik kertas di berbagai tempat di Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan (Sekretariat Negara, 1977: 416).

Rencana pembangunan tersebut dibagi menjadi 17 bagian, 8 jilid, dan 1945 pasal untuk melambungkan tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ricklefs (2008: 554) menyebut rencana pembangunan tersebut sebagai kebijaksanaan ekonomi yang "bersifat tragis dan lucu". Rencana pembangunan tersebut bahkan lebih jauh dianggap semacam kebijakan ekonomi yang tidak berdasar dan masuk akal, atau hanya "omong-kosong ritual besar" ala politik

mercusuar Soekarno. Sementara bagi Kian Wie (2002: 385-6), rencana pembangunan ini berisi kumpulan beberapa proyek yang dimaksudkan untuk "menyenangkan setiap orang tanpa prioritas yang jelas". Sehingga dokumen rancangan ini lebih bersifat dokumen politik ketimbang rencana kerja ekonomi, yang menggariskan jenis masyarakat yang diharapkan tercapai dengan rencana tersebut.

Kata Legge (2001: 377), rancangan ini disusun dengan perhitungan untuk melemahkan sektor ekonomi swasta dan mendorong pertumbuhan birokrasi kapitalisme baru. Sebab di antara isinya ialah uraian tentang program-program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah, yang menghendaki jumlah dana yang luar biasa besarnya. Padahal di saat yang sama negara tengah kekuarangan dana yang serius akibat merosotnya anggaran dan penghasilan ekspor. Disebutkan dalam dokumen rencana pembanguna itu kalau dana-dana untuk keperluan modal diharapkan datang dari sumber-sumber luar, namun anehnya rencana itu sendiri tidak berisi petunjuk yang jelas bagaimana program-program itu harus dibiayai.

Dalam pelaksanaannya, Pembangunan Nasional Semesta Berencana tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bukan saja karena terdapat banyak kelemahan dalam penyusunan rencana, tetapi juga karena terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan. Penyimpangan-penyimpangan itu terdapat baik dalam aspek-aspek pembiayaan maupun aspek-aspek fisiknya (Sekretariat Negara, 1977: 416).

Selain itu, kegagalan ini juga banyak disebabkan oleh inflasi yang meningkat cepat disebabkan pengeluaran besar negara untuk kampanye militer dalam rangka merebut Irian Barat pada tahun 1962-1963 dan diikuti kampanye pula 'Ganyang Malaysia' tahun 1962-1965 (Kian Wie, 2002: 386). Lagi pula, ketika upaya pemerintah mengatur ekonomi sedang meningkat lewat rencana pembangunan itu, korupsi justru malah meningkat, sebab di saat harga-harga naik akibat inflasi, gaji pegawai yang rendah telah mendorong penyogokan, penyalahgunaan alat-alat milik pemerintah, dan kejahatan lainnya yang menjadi bagian dari cara hidup ekonomi Indonesia masa itu (Legge, 2001: 377).

Sementara di saat yang sama, berbagai proyek mercusuar yang dibangun atas kepentingan ekonomi rakyat yang mendesak. Banyak proyek pembangunan

terbengkalai karena perencanaan yang tidak matang dan persiapan yang keliru atau karena tidak dilaksanakan sungguh-sungguh. Ditambah lagi sikap yang memusuhi modal serta bantuan luar negeri (Sekretariat Negara, 1977: 521).

Oleh berbagai sebab itu, membuat Pembangunan Delapan Tahun yang sudah dirancang tidak dapat terlaksana dengan baik sampai masa kekuasaan Presiden Soekarno berakhir.



Upacara pencangkulan untuk pembangunan Gedung Pola oleh Presiden Soekarno yang menandai dimulainya pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama, pada tanggal 1 Januari 1961. Gedung bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dimana pada tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, telah dirubuhkan dan di halaman belakangnya dibangun Gedung Pola tersebut.

Gambar: Pencangkulan Pertama oleh Presiden Soekarno, menandai dimulainya Pembangunan Nasional Semesta Berencana oleh Pemerintah.  
Sumber: Sekretariat Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1977, h. 529.

**Referensi:**

- John D. Legge, *Sukarno, Biografi Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001.  
M.C. Rickelfs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008.  
Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.  
Thee Kian Wie, "Kebijakan Ekonomi di Indonesia Selama Periode 1950-1965, Khususnya terhadap Penanaman Modal Asing", J. Thomas Lindblad (editor), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, 2002.  
Sekretariat Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1977.



## 7. Persatuan Tarbijah Islamiyah (PERTI)

Perti atau PTI bermula dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang lahir untuk mengkoordinasi sekolah-sekolah tradisional (Noer, 1996: 241) ke dalam satu sistem yang sama. Hal itu dimulai pada 5 Mei 1928, ketika Syekh Sulaiman Arrasuli dari Canduang, seorang ulama Kaum Tua yang terpandang, mengambil langkah pertama menuju pembaharuan *surau*-nya dengan meniru sistem madrasah Kaum Muda. Sang Syekh memperkenalkan sebuah sistem sekolah modern bertingkat ke madrasah tradisionalnya dan mengubah namanya menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Pada saat yang bersamaan, ia mengambil langkah pertama menuju unifikasi sekolah-sekolah Kaum Tua di bawah MTI. Dapat dikatakan, MTI merupakan perwujudan dari upaya unifikasi bagi sistem sekolah dan mendirikan front bersama melawan organisasi Kaum Muda yang kian aktif. Sebab Syekh Sulaiman Arrasuli merasa percaya bahwa sekolah-sekolah Kaum Tua membutuhkan sebuah sistem dan kurikulum bersama dalam menghadapi, apa yang Taufik Abdullah (2018: 171) sebut, "jaringan sekolah Muhammadiyah yang tengah meluas dan unifikasi sekolah-sekolah Sumatra Thawalib".

Setelah Syekh Sulaiman, Kaum Tua lain ramai-ramai “mengubah surau mereka menjadi madrasah yang terorganisasi” (Djamal, 2002: 29). Pada Januari 1929, Syekh Djamil dari Jaho, mantan pemimpin Muhammadiyah, juga mengubah nama sekolahnya/suraunya menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Selain utamanya di Bukittinggi yang didirikan Syekh Sulaiman Arrasuli dan di Padangpanjang oleh Syekh Muhammad Djamil Djaho, di Tabek Gadang Syekh Abdul Wahid juga mengubah suraunya berbentuk madrasah dengan nama yang sama, dan di Batusangkar Kaum Tua mendirikan sekolah sebagai pusat pengkajian Quran di Minangkabau (Djamal, 2002: 29; Yunus, 1971: 59). Upaya MTI mengusahakan unifikasi sekolah-sekolah tradisional ini sendiri mendapat dukungan kuat dari pemerintah kolonial di Minangkabau (Abdullah, 2018: 170).

Syekh Djamil dan Syekh Sulaiman bekerja sama dengan erat dalam organisasi ini untuk membendung penetrasi Kaum Muda. Dalam kalangan Kaum Tua, kedudukan dua orang ini sama pentingnya (Hamka, 1967: 295). Selain dua nama itu, tercatat nama-nama lain yang tidak kalah pentingnya seperti Syekh Abbas di Ladang Lawas, Syekh Abdul Wahid di Tabek Gadang, Syekh M. Arifin

di Batuhampar, Syekh Khatib Ali di Padang, Syekh Machudun di Solok, dan Syekh M. Junus di Sasak Pasaman (Yunus, 1971: 59). Kerja sama mereka inilah yang menghasilkan konferensi Kaum Tua untuk pembentukan Persatuan Tarbijah Islamiyah (Perti). Konferensi yang dimaksud diadakan di Canduang, tidak begitu jauh dari kota militer kolonial Fort de Kock (Bukittinggi), tepatnya pada tanggal 20 Mei 1930. Dalam konferensi itu, Kaum Tua menyatakan kebulatan tekad mereka untuk melanjutkan perjuangan mereka atas mazhab Syafii, di mana mereka "mendasarkan program pendidikannya pada pelestarian dan penguatan harmoni antara adat yang abadi dan hukum agama yang wajib (*adat nan kawi, syarak dan lazim*)" (Abdullah, 2018: 170). Untuk itu, mereka berkehendak untuk memajukan amal-amal sosial dan ibadat dengan membangun masjid dan mushala, serta mendirikan madrasah-madrasah dari tingkat rendah sampai tingkat yang paling tinggi (Yunus, 1971: 60).

Selain hal yang di atas itu, upaya Kaum Tua untuk memperluas dan mengembangkan MTI menjadi Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) lebih didasari tujuan utama untuk "mempersatukan segenap golongan Islam tradisional di Indonesia" (Noer, 1996: 241). Sebelum adanya Perti, ulama Kaum Tua sebenarnya sudah punya organisasi bersama bernama Ittihadul Ulama, tetapi sejak konflik dengan Kaum Muda, "organisasi ini begitu cepat merosot" (Abdullah, 2018: 169). Sehingga pendirian Perti menandai "suatu titik balik yang baru bagi konfrontasi dengan Kaum Muda yang telah lebih dulu terorganisir secara lebih baik dalam bentuk Thawalib dan Diniyah" (Abdullah, 2018: 170).

Pada tahun 1932, Perti sempat mengubah nama menjadi Persatuan Pendidikan Islam Indonesia (PPII). Sebagaimana dicatat dalam *Indisch Verslag* (1933: 15), kalau Perti "sebuah perkumpulan guru agama ortodoks di Pantai Barat Sumatera, di bawah pengaruh Kaum Muda, telah berganti nama menjadi Pendidikan Islam Indonesia pada akhir tahun 1932". Memakai nama Indonesia, organisasi ini dicurigai pemerintah kolonial sebagai organisasi politik. Beberapa pengurusnya memilih menarik diri dan PPII tidak pernah berkembang lagi setelah itu, vakum dan bahkan sempat bubar. Pada 1937, dalam kongres di Suliki, pedalaman Minangkabau, Perti dihidupkan lagi dan upaya ini mendapat sokongan

luas dari ulama senior Kaum Tua. Nama lama mereka tampaknya dikembalikan lagi dan nama baru yang dicetuskan tidak pernah populer dipakai.

Para penganjur Perti awal ialah para generasi terakhir dari tradisi besar madrasah di Minangkabau. Mereka ialah personifikasi dari sekolahnya masing-masing dan ulama Kaum Tua yang paling penting di daerahnya. Karena martabat mereka, kerja sama erat mereka dengan otoritas adat, sikap bersahabat pemerintah lokal, dan sekolah-sekolah berorientasi Kaum Tua yang sudah banyak jumlahnya, Perti memayungi 36 sekolah sejak akhir 1930. Mulai dari awal 1931, Perti punya 30 cabang dan sekitar 4.000 anggota (Abdullah, 2018: 170-1). Pada akhir tahun 1930an, Perti memiliki 127 madrasah Islam tradisional di bawah naungannya (Kahin, 2008: 116). Sementara jumlah anggotanya bertambah berkali-kali lipat selama satu dekade berselang. Pada 1941, misalnya, keanggotaan Perti tercatat sudah mencapai 20.000 anggota (*De Sumatra Post*, 17-03-1941).

Mahmud Yunus menulis kalau sejak berdiri Perti telah "hidup dengan kokoh dan subur", mempunyai madrasah-madrasah yang tidak sedikit jumlahnya, dan mempunyai cabang yang melingkupi tidak hanya seluruh Minangkabau, tetapi juga di luar Minangkabau (Yunus, 1971: 57). Akan tetapi, karakter Perti sebagai sebuah organisasi yang sebagian besar bercorak personal dan terbatas, di mana pemimpinnya yang kebanyakan bergelar syekh menjadi figur kunci yang ditakzamkan, menjadikan Perti sulit berkembang lebih jauh lagi. Selama masa kolonial, Perti hanya organisasi yang relatif kecil dan tidak dapat mengimbangi organisasi kaum modernis Muslim seperti Sumatra Thawalib dan Diniyah (Noer, 1996: 241; Djamal, 2002: 70). Karakter Perti yang personal dan agak otoriter memperlemah kemampuannya untuk bersaing dengan organisasi Kaum Muda dan pada akhirnya tidak membuatnya terlalu berkembang (Abdullah, 2018: 171).

Bagi pemerintah kolonial, Perti dianggap organisasi yang loyal, dan tidak terlibat dalam politik (Abdullah, 2018: 172). Namun, setelah Indonesia merdeka, ketika Maklumat Pemerintah RI tanggal 2 November 1945 yang menganjurkan untuk mendirikan partai-partai politik keluar, maka Perti pun diubah "dengan suara bulat" menjadi partai politik bernama Partai Islam Perti (Djamal, 2002: 70; Yunus, 1971: 59). Dalam kongres Partai Islam Perti di Jakarta tanggal 11 Agustus 1955 diputuskan untuk memindahkan pusat pimpinan partai dari Bukittinggi ke

Jakarta (Yunus, 1971: 60). Dalam pemilu 1955 di Sumatra Barat, dibawah komando H. Sirajuddin, partai ini menjadi partai Islam terbesar kedua setelah Masyumi (Asnan, 2007: 83, 119). Partai Islam Perti, tidak seperti Masyumi, selamat dari penghancuran setelah Orde Lama jatuh, dan tetap bertahan sebagai partai politik hingga awal Orde Baru. Pada pemilu 1977, partai ini termasuk yang terbesar di Sumatra Barat setelah Golkar dan Parmusi (Partai Muslim Indonesia) (Kahin, 2008: 403). Namun, setelah itu, Orde Baru segera merampingkan partai-partai Islam dengan memargernya ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak itu, Perti kembali menjadi organisasi masyarakat Islam non-partai sampai sekarang.



Gambar: Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Canduang tahun 1930an. Sumber: <https://tarbiyahislamiyah.id>.

**Referensi:**

Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

*De Sumatra Post*, 17 Maret 1941.

Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Nederland Institut voor Oorlogdocumentatie & KITLV-Jakarta, 2007.

Hamka, *Ajahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, Jakarta: Djajamurni, 1967.

*Indisch Verslag*, 1933.

Mahmud Junus, *Sedjarah Islam di Minangkabau*, Jakarta: Al-Hidajah 1971.

Murni Djamal, *Dr. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*, Jakarta: INIS, 2002.

Taufik Abdullah, *Sekolah dan Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat, 1927-1933*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.

## 8. Oetoesan Hindia

*Oetoesan Hindia* ialah surat kabar yang terkenal sebagai organ dari Sjarikat Islam (Ricklefs, 2008: 390). Latar belakang berdiri surat kabar ini ialah “perseteruan antara golongan pedagang Tionghoa dengan pedagang Arab dan Pribumi.” Bermula dari pemogokan pasar Tionghoa di Surabaya, yang terjadi pada Februari 1912. Percekcokan dan perkelahian kian memanas. Para pedagang Arab dan Bumiputra memboikot golongan Tionghoa, salah satunya dengan tidak memasang iklan di surat kabar milik komunitas tersebut. Mereka sadar, arti penting dan fungsi surat kabar bagi promosi usaha mereka, maupun bagi sumber informasi atau berita. Jadi, mereka berinisiatif mendirikan surat kabar sendiri, yang mampu mengakomodir kebutuhan mereka itu.

Hasan Ali Soerati, memimpin para pedagang Arab dan bumiputra mendirikan perusahaan bernama NV Handel Maatschappij Setija Oesaha Soerabaia. Hasan Ali dan gabungan pengusaha Arab dan Bumiputra Surabaya, Semarang, Pekalongan, Batavia, dan Bandung berpatungan untuk mengumpulkan 50.000 gulden bagi modal awal perusahaan itu. Dengan modal itu, pada Desember 1912, perusahaan tersebut berhasil menerbitkan nomor percontohan *Oetoesan Hindia* (Rahzen, 83). Sementara secara resmi mulai terbit pada 1 Januari 1913 (Adam, 2003: 267).

Jargon surat kabar ini tertulis "Surat Chabar dan Advertentie". Di bawah nama besar surat kabar itu tertulis nama penerbitnya, perusahaan N. V. Handel Maatschappij Setija Oesaha Surabaya. Berhubung mayoritas pemilik saham Setija Oesaha ialah para aktivis Sjarikat Islam, adalah wajar jika surat kabar *Oetoesan Hindia* yang diterbitkannya berfungsi sebagai media propaganda SI, khususnya untuk wilayah Surabaya.

Pemimpin surat kabar ini awalnya ialah Tjipto Mangoenkoesoemo, yang bertindak sebagai hoofdredacteur atau redaktur kepala. Kala itu, dr. Tjipto bermukim di Malang, dan tengah menjadi Ketua Debatting Club Kartini. Namun, dr. Tjipto kemudian pindah ke Bandung untuk bergabung dengan kelompok Douwes Dekker di surat kabar *De Expres*. Maka, untuk menggantikan dr. Tjipto, diangkatlah Tjokroaminoto sebagai hoofdredacteur atau redaktur kepala.

Hasan Ali Soerati menunjuk Tirtodanudjo sebagai mederedacteur (redaktur) untuk membantu Tjokroaminoto yang dianggap masih hijau di dunia persuratkabaran. Tirtodanudjo sendiri ialah jurnalis yang berpengalaman, pernah menjadi redaktur *Sinar Djawa*, dan pernah pula jadi pegawai *Volkslecture* (lembaga pemerintah untuk urusan penerbitan buku dan sensor). Posisi directeur dipegang Tjokrosoedarmo dan penanggung jawab administrasi berada di tangan Wirosenggono. Anggota redaksinya yang lain ialah Sosroboto dibantu oleh beberapa penulis lepas.

Dalam pengelolaan surat kabar ini muncul persaingan interes, antara kelompok yang ingin menjadikannya tetap setia sebagai organ perjuangan dan yang ingin mengembangkannya sebagai bisnis pers yang menguntungkan. Perseteruan itu melibatkan Tjokroaminoto dan Hasan Ali Soerati. Tentang hal tersebut, *Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche Pers* edisi 19 Februari 1921 menulis, selengkapnya: "Ia pertama-tama menyatakan tentang keadaan Utusan Hindia bahwa N. V. Setija Oesaha, penerbit majalah itu, memuat banyak modal dari kalangan Arab, sehingga tidak heran jika Tjokroaminoto yang menganggap *Oetoesan Hindia* sebagai organ perlawanan, seringkali muncul konflik dengan beberapa pemegang saham yang melihat masalah ini lebih dari sudut pandang perdagangan. Jadi, dua pihak muncul di perusahaan, yang mendukung "gerakan perjuangan" dan yang berpikir secara kapitalistik; tentu saja hubungan menjadi semakin tegang."

Pada 1913, Tjokroaminoto berhasil menyingkirkan Hasan Ali Soerati dari N.V. Setija Oesaha. Tjokro dan pendukungnya memaksa Hasan Ali Soerati dan beberapa orang lain yang mendukungnya untuk mundur dari perusahaan yang menerbitkan surat kabar *Oetoesan Hindia* tersebut. Dengan dukungan dan bantuan finansial dari anggota SI yang anti kepada Hasan Ali Soerato, Tjoko juga membeli habis saham milik Hasan Ali Soerati. Jadi, secara de facto, Tjokroaminoto resmi menjadi direktur Setija Oesaha, dan sekaligus sebagai hoofdredacteur *Oetosan Hindia* (Rahzen, 2007: 84), maka dapat dikatakan Tjokro telah berkuasa sepenuhnya atas koran itu. Hal ini akan berdampak besar kepada nomor-nomor terbitan *Oetoesan Hindia* setelahnya.

Di bawah kendali Tjokroaminoto, surat kabar ini semakin kokoh hadir untuk mendukung mobilisasi Sjarikat Islam sebagai sebuah gerakan rakyat. Surat kabar ini menyuarakan keluhan rakyat dan membangkitkan minat terhadap organisasi-organisasi kebangsaan (Adam, 2003: 286). Di samping itu, juga hendak menyalurkan obsesi organisasi ini dalam "perjuangan membebaskan pikiran yang bangkit di kalangan intelektual Sjarikat Islam" di mana hal itu hanya bisa dilakukan paling bagus melalui pers, "sebab di situlah generasi baru Indonesia bisa secara bebas menyatakan gagasan dan opini mereka," demikian Ahmad Adam menulis (2003: 291).

Terbit 5 kali seminggu, senin-kamis dan hari Sabtu. Meski awalnya anti-Tionghoa, dalam perkembangannya kemudian halaman koran ini banyak diisi iklan dari usaha-usaha penguasa peranakan. Terutama iklan lotre. Mungkin pengurusnya sadar pemasukan dari iklan yang besar dapat menopang agar koran Oetoesan Hindia untuk tetap hidup. Oetoesan Hindia berisi berita dan iklan dengan porsi yang seimbang. Berita menempati halaman pertama, di mana yang dimuat kebanyakan terkait dengan kegiatan SI. Adapun halaman dua berisi opini, berita kawat dunia, kabar-kabar ringan, pemberitahuan, dan kolom Hindia Olanda yang memuat serba-serbi kejadian di Hindia Belanda. Sisanya berisi iklan dengan berbagai ukuran (Rahzen, 2007: 85).

Surat kabar ini berperan besar dalam memantik semangat pergerakan kebangsaan. Bung Karno pernah menulis di surat kabar ini. Sementara Bung Hatta dekat dengan gagasan kebangsaan Tjokroaminoto karena sering membaca surat kabar ini semasa menjadi anggota Jong Soematanen Bond (Parakriti, 2000: 724). Banyak tulisan 'garang' dan 'keras' dari aktivis SI yang dimuat di rubrik opini di koran ini, rubrik yang jadi populer dan ditunggu-tunggu pembacanya. Tirjodanudjo dan Samsi termasuk di antaranya yang dikenal tajam dan kritis dalam mendedahkan soal-soal aktual di dalam dan luar negeri yang membuat dua orang ini beberapa kali berurusan dengan polisi dan pengadilan kolonial. Koran ini juga menjadi mimbar bagi Abdul Muis, Agus Salim, Wignyodisastro, Sujopranoto, dan tokoh pergerakan lainnya menyuarakan pandangannya (Rahzen, 2007: 85).



*Oetoesan Hindia* mulai mundur sejak tahun 1922. Gejolak di tubuh SI yang tidak kunjung reda membawa dampak bagi kelangsungan koran ini. Ruth T. McVey (2017: 125) menulis kalau pada kurun ini para petinggi SI tidak lagi mengandalkan koran ini untuk memperoleh dukungan. Sementara biaya produksi kian tinggi tanpa mampu ditutupi oleh pendapatan dari penjualan. Ditambah lagi, semakin lama iklan semakin tidak ada lagi yang masuk yang membuat keuangan perusahaan memburuk. Pengurus pun semakin sibuk dalam kegiatan-kegiatan politik. Ditambah lagi Tjokroaminoto diusir Gubernur Jenderal van Limburg Stirum dari Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah karena ulahnya yang dianggap menyinggung pemerintah kolonial dan pemerintah setempat (Rahzen, 2007: 85). Pada bulan Maret tahun 1923, *Oetoesan Hindia* pun mati, "berhenti terbit karena kekurangan dana," demikian tulis T. McVey (2017: 238). Sekalipun Alimin yang bergabung dengan Muso dan Sosrokardono mencoba menghidupkannya kembali, namun tampaknya upaya itu hanya bersifat jangka pendek (McVey, 2017: 240).



Gambar: Halaman depan *Oetoesan Hindia*, edisi 12 Juni 1922. Sumber: <https://opac.perpusnas.go.id>.

**Referensi:**

Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913* (terjemahan), Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, dan Perwakilan KITLV-Jakarta, 2003.

M.C. Rickelfs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (terjemahan), Jakarta: Serambi, 2008.

*Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche Pers*, 1921, No 33, 19-02-1921.

Parakitri T. Simbolon, "Hatta-Soekarno: Dua Versi Indonesia", J.B. Kristanto (editor), *Seribu Tahun Nusantara*, Jakarta: Kompas, 2000.

Ruth T. McVey, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bamdu, 2017.

Taufik Rahzen (editor), *1907-2007 Seabad Pers Kebangsaan*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.

## 9. Oetoesan Ra'iat

Terbit dan beredar di Langsa sejak 1 Januari tahun 1923 (Surjomihardjo, 2002: 89). Surat kabar berbahasa Melayu ini terbit tiga kali dalam sebulan. Diterbitkan oleh sebuah perusahaan bumiputra bernama Peroesahaan Samoedera. Perusahaan ini sendiri beralamat di Kampoeng Tjina II No. 13, Langsa, Aceh. Pada awalnya pencetakannya dilakukan oleh Medansche Drukkerij, di Medan. Namun, pada edisi Th. I No. 6, 28 Februari 1923, koran ini mengalami pergantian percetakan ke N.V.H. Mij Setia Bangsa, masih di Medan juga (Rahzen, 2007: 208).

Latar belakang surat kabar ini didirikan ialah untuk memudahkan akses kepada informasi bagi masyarakat Langsa. Dalam maklumat nomor pertamanya dituliskan: "jang lahir dari, oleh, oentoek ra'iat kecil. Koempulan dari orang-orang jang saling menjoembang oentoek mendirikan soerat kabar ini djadilah namanja Oetoesan Ra'iat". Sebagai surat kabar yang bercita-cita Indonesia Merdeka, slogannya ini ialah "Choeth'bah Merdeka" (Rahzen, 2007: 209).

Pendirinya ialah Abdoelxarim M.S. Dia dikenal sebagai salah seorang pemimpin Komunis Sumatra. Ia yang bernama asli Abdoe'l Karim Moehammad Soetan adalah "seorang Minangkabau yang tumbuh di Aceh dan Sumatra Timur," tulis Anthony Reid (2005). Dia adalah seorang "the commander of the PKI in Sumatra", tulis Takao Fusayama (2010). Pada tahun 1924, dia menjadi pemimpin PKI di Langsa dan kemudian menjadi komisioner CC-PKI untuk Sumatra (Horton, 2012). Parada Harahap (1926), sejawatnya dalam pers pergerakan, dengan agak hiperbolik menyebut Xarim sebagai "... seorang Communisten sedjati".

Secara terbuka dalam maklumatnya pada edisi pertama, Abdulxarim dalam surat kabar ini memaklumkan kalau *Oetoesan Ra'iat* akan menyerukan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan pergerakan. Aroma Islam memang telah tercium sejak awal surat kabar ini didirikan. Tempat, tradisi, dan budaya memang membangun karakter Islamisme dalam *Oetoesan Ra'iat*. "Dikemas lewat format dakwah bermedium tulis, *Oetoesan Ra'iat* menghadirkan nuansa baru membangkitkan gairah gairah pergerakan lewat surat kabar. Tanpa mesti mengubah tradisi, *Oetoesan Ra'iat* hadir menyapa pembacanya" (Rahzen, 2007: 209).

Dengan melihat latar belakang Abdulxarim sebagai tokoh pergerakan nasional yang berideologi komunis di atas, pendekatan ini terbilang aneh tetapi sekaligus unik. Xarim menerapkan pendekatan ini supaya suratkabarnya berterima di kalangan pembaca "guna menyesuaikan dengan lingkungan sosial masyarakat Aceh yang memiliki karakter keislaman yang kuat dan taat" (Rahman, 2019: 79-80).

Namun, secara umum, *Oetoesan Ra'iat* banyak memuat berita tentang aktivitas perjuangan dan keadaan di Aceh. Berita-berita dan artikelnya meliputi ekonomi, sosial, politik, agama dan pertanian. Surat kabar empat halaman ini juga memberi ruang cukup untuk iklan menyadari kalau tanpa pemasukan dari iklan akan sulit baginya bertahan.

Mulai Januari 1923 terjadi persekutuan antara *Oetoesan Ra'iat* dengan *Sinar-Zaman*, Medan. Disepakati bahwa surat kabar tersebut tetap bernama *Oetoesan Ra'iat*. Tetapi *Sinar-Zaman* mendapatkan ruang khusus dalam *Oetoesan Ra'iat*. Maka tepat pada edisi Th. I No. 4 muncul format baru: *Sinar-Zaman* sepaket dengan *Oetoesan Ra'iat*. Dalam format baru ini, dalam Rahzen (2007: 209-10) disebutkan kalau "tujuan *Oetoesan Ra'iat* tetap tidak berubah, tetapi setiap di jalur pergerakan. Justru masuknya *Sinar-Zaman* kian memperkaya amunisi tulisan *Oetoesan Ra'iat*. Koran *Sinar Zaman* dikhususkan untuk kabar pergerakan di luar negeri. Tujuannya, berita-berita itu bisa menjadi suplemen bagi aktivis-aktivis pengemudi pergerakan di tanah air."

Pada awal-awal penerbitannya, *Oetoesan Ra'iat* tersebar ke beberapa daerah di luar Langsa melalui agen-agen. Misalnya, di Medan dimotori Mas Soemosoediro, di Padang oleh M. Sjarif, dan di Tenggara oleh E.M. Rasjidi (Rahzen, 2007: 208) Di Aceh, selain Langsa yang menjadi pusat penerbitan surat kabar ini, hanya ada kota Lhokseumawe yang memiliki agen. Namun pada bulan kedua penerbitannya, agen di wilayah Aceh sudah bertambah, yakni di Koetaradja (dikelola oleh Hassan) dan Beurnun-Sigli (dikelola oleh Kimin Ch). Pada bulan keempat, *Oetoesan Ra'iat* memiliki agen di Idi yang dikelola oleh Muhammad Ali.

Namun, menjelang akhir tahun 1923, surat kabar terlihat kepayahan mempertahankan eksistensinya. Penerbitannya berakhir ketika pada 27 Oktober

1923 terbit Edisi Th. I No. Mengaso, yang di situ diumumkan keputusan tidak terbit lagi itu. “Hari ini telah diambil ketetapan, bahwa terbitnja Oetoesan Ra’iat dihentikan sementara. Dimaaloemkan.”

Ada beberapa alasan yang menjadi sebab kematian koran ini. Manajemen yang kurang rapi dan banyak pelanggan tidak membayar uang langganan koran (Rahzen, 2007: 210) ialah di antaranya sebab paling utama.



Gambar: Abdoelxarim M.S., pendiri *Oetoesan Ra'iat*. Sumber: Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*, Oxford University Press, 1979.

**Referensi:**

- Abdurrachman Surjomihardjo dkk., *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Anthony Reid. 2005. *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, Singapura: Singapore University Press.
- Aulia Rahman, "Abdul Xarim, Propaganda, dan Masuknya Komunisme di Aceh pada Tahun 1920-an", *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 6 (1), 2019: 74-81.
- Parada Harahap, *Dari Pantai ke Pantai Jilid II: Perdjalanen ke-Soematra*, Weltevreden: Bintang Hindia, 1926.
- Takao Fusayama, *A Japanese Memoir of Sumatra, 1945-1946: Love and Hatred in the Liberation War*, Jakarta: Equinox, 2010.
- Taufik Rahzen (editor), *1907-2007 Seabad Pers Kebangsaan*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.
- William Bradley Horton, "The Political Work of Abdoe'lxarim M.S. in Colonial and Japanese Occupied Indonesia (1930s-1940s)". *Waseda Studies in Social Science*, Vol. 12, No. 3 (Maret 2012), h. 36-57.

## 10. Oetoesan Melajoe

Suratkabar ini wadah bagi kaum adat di Minangkabau untuk menyampaikan ide dan gagasan. Artikel-artikel yang tayang di sana umumnya membela dan mempertahankan tradisi dari segala macam serangan (Darwis, 2013: 111). Ia menjadi organ dan wadah tempat berkumpul orang-orang yang memiliki perhatian terhadap kelestarian budaya. Penggagasnya, Datoek Soetan Maharadja, seorang tokoh adat paling populer di sepanjang Pantai Barat Sumatera pada awal abad ke 20 (Rahzen, 2009: 73). Terkategori sebagai pers yang menyuarakan aspirasi kaum tradisional/adat, dapat dikatakan kalau haluan koran ini konservatif dan pro-adat.

*Oetoesan Melajoe* terbit pertama kali pada 1910. Koran ini terbit setiap hari, kecuali hari Jumat dan Minggu serta hari lain yang dimuliakan. Kantor administratie & redactie-nya beralamat di Pasar Gadang, Padang, dan dicetak oleh percetakan Snelpersdrukkerij Orang Alam Minang (Rahzen, 2009: 73).

Sebagai pendirinya, Maharadja duduk langsung sebagai pemimpin redaksi *Oetosan Melajoe*. Maharadja seorang adat yang terpelajar, yang “meskipun tidak dari sekolah tinggi, tetapi sampai pindah dan pandai berbahasa Belanda,” kata Parada Haharap (1926: 61). Untuk mengurus koran yang dibuatnya, Maharadja melibatkan anaknya, Siti Zubaidah Ratna Djuwita, dalam koran ini sebagai anggota redaksi. Surat kabar berbahasa Melayu ini beredar di hampir seluruh daerah di Minangkabau dan Sumatra. Peredarannya bahkan terus berkembang hingga ke pulau Jawa. Penyumbang tulisan juga datang dari berbagai daerah tidak saja dari kalangan orang Minangkabau sendiri (Fitriyanti, 2001: 72). Koran ini hadir dalam empat halaman dengan dua halaman berita dan sisanya untuk *advertentie*. (Rahzen, 2009: 73). Dua halaman *advertentie* penuh dengan iklan berbagai produk. Iklan ialah salah satu pemasukan yang diandalkan koran ini selain penjualan cetak dari pelanggan. Biaya iklan ditetapkan 10 sen untuk satu kata. Bagi yang berlangganan biaya memasang iklan akan didiskon. Dua halaman yang disediakan khusus untuk iklan selalu penuh. Iklan-iklan yang pernah ditampilkan di antaranya iklan persewaan mobil, buku kesehatan yang baru saja terbit, opera yang akan segera tayang, dan yang hampir selalu terpampang di halaman *advertentie* adalah "iklan pakaian batik Jogjakarta dan Solo" (Rahzen, 2009: 74). Tidak terkecuali, yang ironik, koran ini juga mengiklankan bir atau

minuman keras. "*Oetoesan Melajoe*, surat kabar harian umum Datuk Soetan Maharadja, murka dalam editorialnya terhadap bahaya-bahaya opium dan alkohol sepanjang 1910-an. Tapi iklan minuman keras termasuk yang paling konsisten dalam surat kabar itu" (Hedler, 2008: 297).

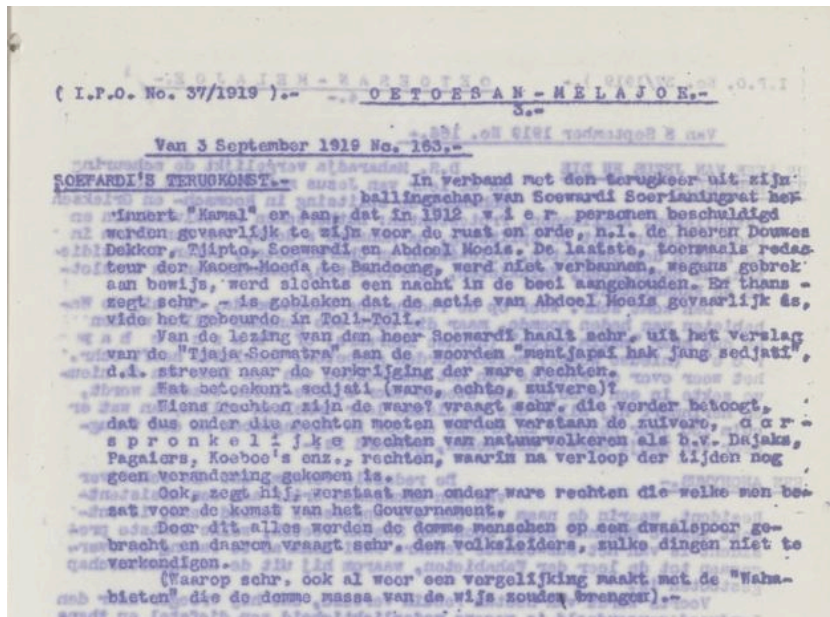
Sementara dua halaman berita menyediakan beragam rubrik. Dua yang paling penting adalah rubrik *Chabar Berita* yang mengulas informasi terkini di Minangkabau dan sekitarnya serta rubrik *Chabar Dunia* yang menguraikan berita aktual di seantero dunia. Selain itu, sebagai koran yang diterbitkan oleh orang-orang pendukung adat, koran ini selalu menyediakan laporan khusus berkaitan dengan aspek-aspek budaya Minangkabau. Pembelaan terhadap kaum adat menjadikan *Oetoesan Melajoe* sebagai corong terpenting kalangan ini dalam melawan serangan kaum modernis di Minangkabau. Lewat tulisan-tulisannya di *Oetoesan Melajoe*, Maharadja sering menyampaikan sinisme yang keras terhadap Kaum Muda, menyebut para ulama pembaharu tersebut sebagai kaum Wahabi atau kaum Padri yang "dikhawatirkan akan membuka kembali luka lama mereka mengenai Perang Padri" (Rahzen, 2009: 74). "Kita orang Minangkabau harus mengusahakan jangan sampai kita kehilangan kemerdekaan kita dengan menyerahkan diri kita kepada orang-orang Mekkah," tulis Schirieke (1973: 38) mengutip salah satu artikel yang ditulis Maharadja di *Oetoesan Melajoe*.

Kurun 1911-1913 menjadi titik puncak konflik *Oetoesan Melajoe* dengan kaum Muslim pembaharu itu. Bila artikel-artikel di *Oetoesan Melajoe* mencap label ortodoks pada Kaum Muda, sebaliknya redaksi *Al-Moenir* (majalah yang menjadi corong Kaum Muda): "mencela kebiasaan orang Minangkabau yang tidak sesuai dengan agama Islam khususnya perilaku para pemimpin adat." Tidak hanya dengan majalah kaum pembaharu Islam saja, dengan sesama surat kabar umum pun *Oetoesan Melajoe* juga berseteru. Maharadja sering menyerang koran *Pertja Barat* kepunyaan Dja Endar Moeda, yang kemudian melakukan pembalasan "dengan lebih keras" sampai-sampai dalam sebuah tajuk koran itu menjuluki Maharadja dengan julukan merendahkan: DB alias Datoek Bangkit. Dalam bahasa Minangkabau, kata 'bangkit' bisa berarti orang yang prilakunya memuakkan (Rahzen, 2009: 75), atau bisa juga berarti orang yang tengah menanggung penyakit semacam penyakit gila.



Mencerca dengan keras golongan tertentu dari bangsa sendiri, *Oetoesan Melajoe* justru dikenal sangat setia dengan pemerintah kolonial Belanda. Motto yang terpampang di halaman pertama *Oetoesan Melajoe* berbunyi: *Oentoek kemadjoean kepandaian ilmu pengetahoean peroesahaan tanah dan perniagaan Tegoehlah setia persaoedaraan anak negeri dengan orang Wolanda* (Rahzen, 2009: 75). Jauh sebelum itu, Maharadja sudah mempertontonkan sikapnya itu dengan mengemukakan pandangan kalau bersekutu dengan Belanda akan membawa bangsa Minangkabau menjadi besar. Pada tahun 1906, misalnya, dia mengambil prakarsa untuk memperingati peristiwa datangnya orang-orang Belanda untuk pertama kalinya ke Padang (Schrieke, 1973: 42). Tindakan-tindakan Maharadja dan tulisan-tulisannya di *Oetoesan Melajoe* itu membuatnya dimusuhi banyak orang. Pada tahun 1918 seorang pemimpin Jong Soematera Cabang Batavia menyebutnya sebagai '*pianggang*', serangga penyengat orang yang konservatif primitif egois penjilat atau pengejar bintang. Mohammad Hatta bahkan terang-terangan menyebutnya sebagai pengkhianat. *Oetoesan Melajoe* bahkan disebut sebagai *fameuse likorgan* alias penjilat besar.

Terlibat konflik di sana-sini, performa *Oetoesan Melajoe* mulai memudar. "Barangkali ini disebabkan oleh habisnya konsentrasi mereka dalam dan meladeni serangan balasan dari lawan-lawannya" (Rahzen, 2009: 76). Puncaknya, pada tahun 1922 *Oetosan Melajoe* berganti nama menjadi *Oetoesan Melajoe - Perobahan*. Percetakan Padangsche Snelpersdrukkerij milik seorang Tionghoa bernama Tjia Eng Thiam tercatat sebagai perusahaan pencetaknya yang baru. Koran yang sebelumnya dicetak dua lembar (empat halaman), menjadi hanya satu lembar (dua halaman) saja. Maharadja digusur dari kursi pimpinan redaksi, dan sebagai pemimpin redaksi yang baru bertindak Abdul Moeis, tokoh pergerakan nasional yang terkenal menyisihkan kaum pendukung adat yang tertinggal. Sebagai wakil pemimpin redaksi duduk A. M. Datoe Sinaro, dan sebagai editor tercatat nama A. Jahja dan Hasan Noel Arifin (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche Pers*, 1923, No 29, 15-01-1923).



Gambar: *Oetoesan Melajoe* edisi 3 September 1919 No 163. Sumber: <https://opac.perpusnas.go.id>.

### **Referensi:**

- B. J. O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: Bharata, 1973.
- B.J.O. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: Bhratara, 1973.
- Fitriyanti, *Roehana Koeddoes Perempuan Sumatera Barat*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan Rio Tinto, 2001.
- Jeffrey Hadler, *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*, Ithaca - New York: Cornell University Press: 2008.
- Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche Pers*, 1923, No 29, 15 Januari 1923.
- Parada Harahap, *Dari Pantai Kepantai: Perdjalanen ke-Soematra*, Weltevreden: Bintang Hindia, 1926
- Taufik Rahzen (editor), *1907-2007 Seabad Pers Kebangsaan*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.
- Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*, Jakarta: Gramedia, 2013.

## 11. Soenting Melajoe

*Soenting Melajoe* ialah surat kabar perempuan yang pertama di Indonesia. Kata 'sunting' pada nama surat kabar itu berarti 'hiasan' (Ricklefs, 2008: 367) yang biasa dipakai di kepala perempuan-perempuan Melayu terhormat. Arti 'soenting' ialah perempuan, sedangkan kata 'Melajou' dimaksudkan ialah tanah Melayu, jadi sebuah surat kabar yang diperuntukkan bagi perempuan di seluruh tanah Melayu (Fitriyanti, 2001: 71). Surat kabar ini mulai terbit di Padang pada 10 Juli 1912. Penggagasnya ialah Datuk Sutan Maharadja, seorang tokoh pers terkenal dan pembela adat Minangkabau paling gencar pada masanya. Namun, sebagai surat kabar wanita, ia digawangi dua perempuan Minangkabau ternama: Ruhana Kudus dan Zubaidah Ratna Djuita. Ruhana, yang kemudian terkenal sebagai pelopor pendidikan perempuan di Minangkabau, duduk sebagai pemimpin redaksinya. Ia mengendalikan surat kabar itu dari di Koto Gadang di mana dia bermukim/tinggal. Sementara, Zubaidah yang tinggal di Padang ialah anak Datuk Sutan Maharadja, diminta ayahnya duduk sebagai pembantu redaksi. Nama kedua orang ini terpampang di halaman muka di samping kiri tiap terbitan. Di bagian tengah atas terdapat tulisan peruntukan surat kabar ini: "Surat Kabar Perempuan di Alam Minangkabau" (Fitriyanti, 2001: 71).

Surat kabar ini terbit dalam bahasa Melayu. Pada awalnya terbit sekali dalam delapan hari, lalu kemudian sekali seminggu. Isi pada terbitan awal, kata Parada Harahap (1926:83), "seakan-akan *Kindercourant* dari surat-surat kanar Belanda, berisi pantun dan sekolah dan teka-teki untuk kaum perempuan". Pada mulanya, kebanyakan laki-laki saja yang menulis di situ dengan memakai nama perempuan. Namun, lama-lama datang juga keberanian perempuan untuk menulis di sana. "Lama-lama ada pula yang berani menulis lebih dalam, seperti Anna Karim dari Bengkulu dan Zoebaidah Retna Djoewita, anak Maharadja sendiri (Harahap, 1926: 83).

Haluan *Soenting Melajoe* ialah menyuarakan ide-ide kemajuan bagi alam Minangkabau, khususnya bagi perempuan untuk tidak tertinggal dari laki-laki. Sebagai corong kaum adat, jalan menuju kesetaraan itu, bagi surat kabar ini ialah melalui "penerapan tradisi/adat Minangkabau yang sebenarnya" dalam kehidupan perempuan. Dengan haluan serupa itu, artikel-artikel yang disajikan dalam

suratkabar ini rata-rata sama dengan topik-topik yang disajikan dalam suratkabar lain yang menyuarakan suara kaum tradisional/adat, tetapi dengan perhatian lebih kepada permasalahan nasib perempuan (Darwis, 2013: 114).

Kata Schrieke (1973: 56), suratkabar ini ialah suratkabar yang "agak lunak dari Datoe' Soetan Maharadja." Suratkabar ini, katanya lagi, "menafsirkan hasrat akan kemerdekaan dari kaum muda sebagai suatu kecenderungan ke arah pergaulan yang tak terbatas." Jadi, kemerdekaan itu sedapat mungkin mesti dibatasi oleh aturan-aturan adat, dalam hal ini adat-tradisi Minangkabau. Sebagai mewakili suara kaum adat, suratkabar ini diketahui gigih menentang pembaharuan di sekolah-sekolah, khususnya terhadap sistem-sistem yang dianggap melanggar tradisi Minangkabau. Suratkabar ini disebut rajin mengeluarkan artikel-artikel yang menyerang metode-metode pendidikan modern yang memang sedang giat-giatnya dipropagandakan kepada anak-anak perempuan Minangkabau masa itu (Darwis, 2013: 114). Oleh sebab itu, tidak heran, jika sebagian besar pembaca suratkabar ini ialah wanita-wanita dewasa Minangkabau.

Selain tulisan berupa artikel, suratkabar ini juga menyiarkan syair yang berisikan imbauan kepada perempuan di mana saja berada untuk terus mengembangkan diri agar berdaya upaya (Hedler, 2008: 257). Suratkabar ini ada juga memuat tulisan sejarah maupun biografi; berita dari luar negeri yang disadur dari majalah atau suratkabar berbahasa Belanda. Strategi ini menghindarkan suratkabar ini dari kesulitan dalam mencari artikel-artikel seputar kehidupan perempuan di berbagai daerah maupun negara lain (Fitriyanti, 2001: 71). Ketika muncul pada tahun 1912, suratkabar ini mengundang perempuan-perempuan Minangkabau untuk berpartisipasi dalam suatu forum publik secara terbuka; suratkabar ini memandang diri sendiri sebagai tantangan yang disengaja terhadap otoritas laki-laki Minangkabau dengan memakai medium modern dan penuh makna politik ini untuk menerbitkan topik-topik perempuan dalam sebuah produk cetak. Kata Jeffry Hedler, "*Soenting Melajoe* mentransformasi topik keluarga dari suatu gaya progresif menjadi suatu kontroversi politik" (Hedler, 2008: 250).

Kelompok pembacanya ialah terutama perempuan jurnalis, para ibu, guru atas istri guru. Makin lama, pelanggan dan kontributor makin terdiri dari kumpulan guru sekolah rendah Minangkabau. Iklan-iklan mencari guru-guru

terakreditasi untuk sekolah-sekolah di seluruh Sumatra seringkali ditampilkan di halaman-halaman terbaiknya. Cerita-cerita yang tayang di surat kabar itu juga berfokus pada perempuan-perempuan Minangkabau yang kemudian mengisi jabatan-jabatan yang pernah diiklankan itu. "Perempuan-perempuan terdidik, lulusan-lulusan sekolah guru yang sudah terbiasa dengan alam tekstual dan dunia progresif yang meluas, meninggalkan kampung-kampung mereka dan mendapatkan pekerjaan di sekolah-sekolah yang sedang merebak di Tapanuli, Bengkulu, Palembang, dan khususnya Medan," demikian Hedler (2008: 257-8).

Pada tahun kelimanya, surat kabar ini menampilkan iklan-iklan reguler untuk penerimaan guru-guru di berbagai sekolah di Sumatera. Misalnya, ada panggilan bagi seorang guru perempuan di sekolah anak perempuan di Langsa, Aceh. Sekolah anak perempuan di Sinabang juga diiklankan tengah mencari seorang guru terakreditasi. Dalam iklan itu diinformasikan besaran gaji, tunjangan-tunjangan, kriteria calon-calon guru yang harus masih muda dan belum kawin, dengan kualifikasi mengajar sekolah rendah dan pelatihan pembuatan barang-barang kerajinan dari ketrampilan-ketrampilan, dan yang paling dicari memiliki kemampuan mengajar tenun (Hedler, 2008: 258). Berkat iklan-iklan ini, beberapa perempuan Minangkabau berhasil memenuhi permintaan akan posisi-posisi guru yang ditawarkan. Sekolah di Langsa, misalnya, mempekerjakan tiga guru Minangkabau bersebab informasi dari iklan-iklan di *Soenting Melajoe* tersebut.

Beberapa jenis iklan lain yang biasa tayang di *Soenting Melajoe* antara lain iklan produk philip, segala jenis batik dari (Pekalongan, Yogyakarta, Purworejo, dan Solo), bermacam-macam peralatan pembuatan pakaian, telegram, dan kesehatan berupa obat-obatan dan jamu tradisional (Rahzen, 2007: 93).

Surat kabar ini beredar di hampir seluruh daerah di Minangkabau dan Sumatra. Sirkulasinya beredar bersamaan dengan surat kabar *Oetoesan Melajoe*. Peredarannya bahkan terus berkembang hingga ke pulau Jawa. Penyumbang tulisan datang dari berbagai daerah. Mula-mula penulisnya rata-rata perempuan, tetapi beberapa laki-laki yang menyokong kemajuan bagi perempuan juga turut menyumbang tulisan (Fitriyanti, 2001: 72). Sekalipun surat kabar ini ditujukan untuk perempuan, dalam perkembangannya tulisan-tulisan yang dimuat tidak

hanya tentang perempuan. Berbagai peristiwa politik dan kriminal yang terjadi di tanah Melayu dan negara-negara lainnya juga diangkat dalam surat kabar ini. Yang menarik, ada juga iklan-iklan yang di dalamnya bukan hanya untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk kebutuhan laki-laki dengan pemikiran sebagai kebutuhan suami yang dibelikan istrinya, seperti kain sarung, kopiah, termasuk peralatan bertukang (Fitriyanti, 2001: 79).

Pada akhir 1910-an, perempuan-perempuan menjadi tidak puas dengan *Soenting Melajoe* dan berpindah kepada kegiatan-kegiatan yang lebih konfrontasional dan terpolitisasi (Hedler, 2008: 290). Surat kabar ini bertahan aktif selama hampir sepuluh tahun, baru berhenti terbit pada tahun 1921 karena masing-masing redaksinya sibuk dengan menerbitkan surat kabar lain (Fitriyanti, 2001: 79) yang lebih progresif. Selain itu, penyebab lainnya juga karena perpindahan pemimpin redaksinya, Ruhana Kudus, ke kota Medan setahun sebelumnya. Sejak berhenti terbit, surat kabar ini tidak pernah terbit lagi.

Slama beberapa tahun surat kabar *Soenting Melajoe* telah menjadi “taman percengkeramaan” bagi kaum perempuan muda Minangkabau, dan sekali-kali mengeluarkan buah pikiran mereka yang tajam yang mendesak untuk mempertinggi derajat kaumnya. Meski ia tidak menjadi bagian dari pergerakan kaum muda yang progresif, tetapi tidak bisa disangkal lagi bahwa surat kabar ini ialah satu jalan untuk kaum perempuan Minangkabau menempuh jalan kemajuan. Oleh sebab itu, tentang *Soenting Melajoe*, “tidaklah harus orang menutupkan matanya sebelah” jika menyebutkan gerakan yang diterbitkannya surat kabar ini (Harahap, 1926: 82).

# SOENTING MELAJOE.

BADANJAS

1 Tahun . . . . . 1.000  
6 Bulan . . . . . 500  
Luar Negeri (termasuk ongkos kirim)  
Setoran bulanan . . . . . 100  
Batas-batas dan ketentuan lain-lain  
dapat akan dilihat di kantor.

Soerat chabar perempoean  
di Alam Minang Kabau.

ADVERTESTIEN.

4 met acre peritahan, 5 met  
500 Assurances (termasuk ongkos kirim)  
dari 7.10—lalu terdapat  
di kantor.

Redaksi:  
Zweibich Mata Djawa,  
di Padang.

Diterbitkan di Padang sekali selapan hari oleh:  
Snelpersdrukkerij „Orang Alam Minang Kabau“.

Datuk Sultan Mahardja,  
SIMPANGKABAU  
Siti Sastri.

### Perbiasan pakain, \*

Kepuasan kita perempoean Melajoe di Alam  
Minang Kabau ini terdapat terdapat perbiasan  
pakain adalah terbiasan, ada yang pada di mana  
bawak perbiasan tersebut bahwa seperti terbiasan  
perempoean diasing dan di perbiasan dari terbiasan  
pakain, terbiasan terbiasan terbiasan ada yang  
yang di terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
lalu dengan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
perempoean terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan

dan K. A. B. dan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan

ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan

Perbiasan pakain, \*  
Kepuasan kita perempoean Melajoe di Alam  
Minang Kabau ini terdapat terdapat perbiasan  
pakain adalah terbiasan, ada yang pada di mana  
bawak perbiasan tersebut bahwa seperti terbiasan  
perempoean diasing dan di perbiasan dari terbiasan  
pakain, terbiasan terbiasan terbiasan ada yang  
yang di terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
lalu dengan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
perempoean terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan

dan K. A. B. dan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan

ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan  
ada yang terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan terbiasan

Gambar: Soenting Melajoe edisi 7 Agustus 1912 - No 10. Sumber: <https://opac.perpusnas.go.id>.

**Referensi:**  
 B.J.O. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*, Jakarta: Bhratara, 1973.  
 Fitriyanti, *Roehana Koeddoes Perempuan Sumatera Barat*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan Rio Tinto, 2001.  
 Jeffrey Hadler, *Muslims and matriarchs: cultural resilience in Indonesia through jihad and colonialism*, Ithaca, New York: Cornell. University Press: 2008.  
 M.C. Rickelfs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008.  
 Parada Harahap, *Dari Pantai Kepantai: Perdjalanen ke-Soematra*, Weltevreden: Bintang Hindia, 1926  
 Taufik Rahzen (editor), *1907-2007 Seabad Pers Kebangsaan*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.  
 Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*, Jakarta: Gramedia, 2013.

## 12. Pemandangan

*Pemandangan* terbit pertama kali pada 8 Agustus 1933 di Jakarta, justru di masa-masa krisis ekonomi (*maleise*) sedang melandai dunia. Pendirinya, Saeroen seorang penulis piawai dan jurnalis bumiputra yang cukup terkenal pada masanya, yang bekerja sama dengan seorang pemilik perkebunan ariestokrat Jawa yang juga menceburkan diri dalam gelanggang pers pergerakan bernama Raden Hadji O. Djunaedi. Djunaedi punya percetakan di Senen (Rosihan, 2012: 11). Djuenadi banyak membantu *Pemandangan* dalam hal pendanaan dan modal. "Djoenaedi "menjdadi 'raga' dari daglad *Pemandangan*", sedangkan Saeroen dapat diumpakan "mendjawi djiwanja" (Rahzen, 2007: 450).

Direkteur hoofdredacteur-nya langsung dijawab oleh Saeroen sendiri. Sementara plv. hoofdredacteur tercatat dipegang D. Koesoemaningrat. Diterbitkan oleh percetakan dengan nama Drujkerij Pemandangan, yang mana direktur percetakan itu dijabat Djoenaedi. Selain Saeroen dan Djunaedi, duduk juga di dewan redaksi nama-nama seperti Ramelan, M. Zain Sanibar (bekas hoofdredacteur koran *Fadjar Soematra*) dan Achmad Joesoef (bekas hoofdredacteur *Djawa Baroe*) yang dianggap jadi redaktur paling muda. Sedangkan untuk bagian juridis dipegang oleh Mr. Soerjadi, bekas *onder-voorzitter* Landraad di Serang dan ketika itu menjadi *advocaat en procureur* di Jakarta (Rahzen, 2007: 451). Soemanang, salah satu pendiri kantor berita *Antara*, juga pernah terlibat di *Pemandangan* pada masa-masa awal, tetapi tidak diketahui berapa lama aktif di situ. Sebab setelah koran ini berubah menjadi harian, namanya tidak disebutkan lagi.

Suratkabar ini awalnya memang terbit sekali seminggu, tetapi pada 27 September 1933 berubah dari mingguan (*weekblad*) menjadi harian (*dagblad*).

Haluan suratkabar ini ialah "mentjoba memihak pada kebenaran". Disebutkan juga suratkabar ini hendak hadir sebagai suratkabar independen yang "berdiri di atas kekoetaan sendiri", jadi tidak hendak bergantung atau mau diintervensi oleh kekuatan lain dalam, baik kekuasaan modal maupun kekuasaan kolonial. Tugasnya hadir dalam dunia persuratkabaran di Hindia Belanda ialah sebagai corong kritik yang adil bagi jalannya kekuasaan, "mentjela dan



peringatkan pada pemerintah ataoe partij apapoen jang menoeroet *Pemandangan* haroes diperingatkan dan ditjela” (Rahzen, 2007: 451).

Di bawah Saeroen, harian ini mendapat kemajuan yang pesat. "Kampret", nama pena Saeroen untuk sebuah rubrik pojok di surat kabar itu mulai terkenal dan ditunggu-tunggu pembacanya karena menayangkan artikel-artikel yang berisi pandangan-pandangan tajam dan kritik terhadap persoalan aktual. Pada 1 Juli 1936, pemimpin redaksi surat kabar ini berganti ke Mohammad Tabrani (Poeze, 1998: 70), seorang jurnalis dan politisi zaman pergerakan yang berperan besar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Tokoh Jong Java ini memimpin redaksi *Pemandangan* pada periode Juli 1936 hingga Oktober 1940. Di bawah Tabrani, Saeroen masih menulis artikel untuk pojok koran itu dengan nama pena yang sama. Namun, pada suatu edisi, Kampret menulis mengenai impiannya tentang Republik Indonesia Serikat. Kolom di pojok itu ditanggapi serius oleh pemerintah kolonial Belanda, yang secara langsung dianggap telah menyerukan agar Indonesia membentuk pemerintah sendiri setelah Belanda diduduki Jerman (Siahaan, 1993: 520). Akibatnya, *Pemandangan* diberangus oleh pemerintah kolonial Belanda (Sinematek, 1979: 424). Koran ini pun kena *persbreidel ordonantie*. Inilah kali pertama impian orang Indonesia akan pembentukan negara sendiri yang tayang di koran terkena ranjau pers (Rahzen, 2007: 142). Percetakan yang mencetak harian *Pemandangan* yang dipimpin Djoenaedi dan Mr. Sumanang yang berkantor di Jl. Senen Raya pun diobrak-abrik politik koloial (Notodijodjo, 1980: 143). Koran ini juga berhenti terbit selama seminggu antara 17 dan 24 Mei 1940, karena dibreidel.

Di awal zaman Jepang, *Pemandangan* yang semula ditutup, kini dibenarkan terbit kembali, tetapi hanya boleh dengan nama baru *Pembangoen* (Notodijodjo, 1980: 95; Marwati, 2008: 99). Surat kabar ini menjadi satu-satunya surat kabar yang tidak tutup atau berhenti terbit pada awal masa Jepang (Rahzen, 2007: 142).

Setelah Indonesia merdeka, *Pemandangan* mengudara lagi di horizon persuratkabaran tanah air. Meskipun bersifat nasionalis, koran ini memilih untuk tidak berpihak kepada partai-partai politik. Pada waktu itu, oplah harian koran ini sekitar 7.000. Pada tahun 1953, *Pemandangan* dituduh membocorkan rahasia nasional mengenai gaji pegawai negeri sipil baru dan investasi asing ke-21

perusahaan. Oleh berbagai deraan yang menyimpannya, pada tahun 1958 koran ini akhirnya berhenti terbit untuk selamanya.



Gambar: Halaman depan *Pemandangan*, edisi 7 September 1935. Sumber: <https://opac.perpusnas.go.id>.

**Referensi:**

Antoinette Liem & Harry A. Poeze, *Lasting Fascinations: Essays on Indonesia and the Southwest Pacific to Honour Bob Hering*, Jakarta: Yayasan Kabar Seberang, 1998.

Hotman Siahaan & Trahjo Purnomo, *Tajuk-tajuk dalam terik matahari: empat puluh tahun Surabaya post*, Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti, 1993.

Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.

Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, ±1942-1998*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Rosihan Anwar, *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*, Jakarta: Kompas, 2012.

Sinematek Indonesia, *Apa siapa orang film Indonesia, 1926-1978*, Jakarta: Yayasan Artis Film & Sinematek Indonesia, 1979.

Soebagijo Ilham Notodidjojo, *Sumanang sebuah Biografi*, Jakarta: Gunung Agung, 1980.

Taufik Rahzen (editor), *1907-2007 Seabad Pers Kebangsaan*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.